

IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM: STUDI KASUS DI RW 003 CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKARTA PUSAT

Putravito Dwineo*), Teguh Yuwono **)
Email: putravitodwineo@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275
Telepon: (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Website: <https://fisip.undip.ac.id> | Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Climate change is a global challenge that requires multi-stakeholder collaboration for mitigation and adaptation. The Climate Village Program (ProKlim) by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is designed to enhance community resilience to climate change impacts through active participation from the government, private sector, and communities. This study analyzes the collaborative governance process in implementing ProKlim at RW 003 Cempaka Putih Timur, Central Jakarta, focusing on the roles of the government, private sector, and community.

This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with ProKlim administrators, representatives of the DKI Jakarta Environmental Agency, and PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Bogasari Division), as well as observations and document analysis. Data analysis is based on Morse and Stephens' (2012) collaborative governance theory, which includes four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. Assessment; Stakeholders shared a common vision on the importance of collaboration to address climate change, though each faced resource limitations. Initiation; The government acted as the initiator by establishing coordination forums, while the private sector and community contributed through infrastructure provision and program implementation. Deliberation; Deliberation processes resulted in agreements such as Cooperation Agreements (PKS) and hydroponic programs as adaptation solutions. Implementation; The program was successfully implemented through diversified activities, including waste banks, urban farming, and nutrition ponds, despite challenges such as land limitations and inter-stakeholder coordination.

Collaborative governance in ProKlim RW 003 Cempaka Putih Timur demonstrates effectiveness in integrating the roles of government, private sector, and community. The program's success is supported by shared vision, clear collaborative structures, and adaptation to local needs. However, institutional capacity building and improved coordination are needed to ensure program sustainability.

Keywords: Collaborative Governance, Climate Village Program, Climate Change, Multi-Stakeholder Collaboration, Adaptation and Mitigation.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan isu global yang dampaknya semakin dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem menjadi gejala nyata dari krisis iklim yang tengah berlangsung.

Menurut laporan World Meteorological Organization (WMO) tahun 2024, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah modern. Suhu rata-rata global telah meningkat sebesar 1,45°C di atas level pra-industri. Tren ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukanlah ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang harus dihadapi saat ini.

Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis, tergolong sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut, ancaman kekeringan, dan meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional, khususnya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

Jakarta sebagai ibu kota negara mengalami tekanan lingkungan yang berat akibat urbanisasi, polusi, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Perubahan iklim memperparah kondisi ini dengan memicu banjir, cuaca panas ekstrem, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terstruktur dan kolaboratif sangat diperlukan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merancang Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat melalui pelibatan aktif berbagai aktor dalam aksi lingkungan.

ProKlim menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya untuk menjalankan berbagai kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Skala pelaksanaan program dapat dilakukan pada unit paling kecil seperti RT, RW, hingga tingkat kelurahan atau desa.

Penerapan collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan dalam pelaksanaan ProKlim, karena menuntut sinergi antarpemangku kepentingan. Collaborative governance sendiri mengacu pada suatu bentuk tata kelola partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Konsep ini menekankan pentingnya dialog, transparansi, dan tanggung jawab bersama antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam konteks ProKlim, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program.

RW 003 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, merupakan salah satu wilayah urban yang berhasil menerapkan ProKlim secara berkelanjutan. Wilayah ini terpilih menjadi lokasi ProKlim sejak tahun 2018 dan berhasil meraih penghargaan

ProKlim Lestari tingkat nasional pada tahun 2022.

Keberhasilan RW 003 tidak terlepas dari adanya kepemimpinan lokal yang kuat, komitmen masyarakat, serta dukungan dari pihak pemerintah dan sektor swasta seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Divisi Bogasari). Kolaborasi antara aktor-aktor ini menciptakan inovasi dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Contoh kegiatan yang dilakukan meliputi urban farming dengan sistem hidroponik, pengelolaan sampah melalui bank sampah, pemanfaatan air hujan, serta konservasi energi melalui penggunaan solar cell. Kegiatan ini menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan secara konkret di tingkat komunitas.

Namun, kolaborasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terdapat tantangan dalam hal koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya kapasitas teknis di kalangan warga. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana proses collaborative governance berlangsung di lapangan.

Penelitian ini mencoba menggali proses kolaboratif tersebut berdasarkan tahapan model collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse & Stephens (2012), yaitu assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas kolaborasi dalam pelaksanaan ProKlim di RW 003.

Studi ini menjadi penting karena menawarkan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika kolaborasi antaraktor dalam konteks kebijakan lingkungan lokal. Dalam skala mikro, penelitian ini juga memberi gambaran tentang bagaimana komunitas perkotaan merespons isu global seperti perubahan iklim.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai collaborative governance di Indonesia, khususnya pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Selama ini, kajian-kajian tentang tata kelola kolaboratif masih lebih banyak difokuskan pada sektor pelayanan publik atau kebijakan sosial.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat pelaksanaan ProKlim di daerah lain. Pengalaman RW 003 dapat dijadikan sebagai best practice dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi krisis iklim.

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dalam merancang program-program yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, pelibatan sektor swasta dalam program lingkungan seperti ProKlim menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Kolaborasi ini membuka peluang kemitraan baru dalam bidang Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari sisi masyarakat, partisipasi dalam program lingkungan dapat meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan rasa memiliki terhadap ruang hidup mereka. ProKlim mendorong transformasi budaya lingkungan dari pasif menjadi aktif, dari konsumtif menjadi produktif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis pelaksanaan ProKlim, tetapi juga dimensi sosial-politik dari kolaborasi yang terbangun. Penekanan pada proses menjadi penting karena dari proses inilah terbentuk kepercayaan, komitmen, dan keberlanjutan program.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam pelaksanaan ProKlim di RW 003 Cempaka Putih Timur. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta berinteraksi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 003 Cempaka Putih Timur. Studi kasus memberikan fleksibilitas untuk memahami konteks, dinamika, dan interaksi sosial yang memengaruhi keberhasilan suatu program kolaboratif di tingkat lokal.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain Ketua RW 003, pengurus ProKlim Lestari, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan staf CSR dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Divisi Bogasari). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen program, laporan kegiatan, foto lapangan, berita media, serta peraturan perundang-undangan terkait ProKlim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara utama: observasi partisipatif, wawancara semi-struktural, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi RW 003 untuk melihat bagaimana aktivitas lingkungan dan kolaborasi berlangsung di lapangan. Wawancara semi-struktural digunakan untuk memungkinkan eksplorasi

mendalam terhadap pandangan para aktor mengenai proses kolaboratif yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi temuan dari wawancara dan observasi, sedangkan studi pustaka memberikan kerangka konseptual dan teoritik bagi analisis.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan yang dinilai memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan ProKlim. Selain itu, teknik snowball juga digunakan untuk menggali informasi dari jaringan informan yang saling terkait, sehingga data yang diperoleh semakin kaya dan kontekstual.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, metode, dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan dapat dipercaya dan merepresentasikan realitas secara menyeluruh.

Analisis data dilakukan secara induktif, menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dari data mentah, kemudian disajikan dalam bentuk matriks, narasi, atau tabel tematik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Model collaborative governance dari Morse dan Stephens (2012) digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Model ini terdiri dari empat tahapan: assessment (penilaian awal), initiation (inisiasi kolaborasi), deliberation (musyawarah dan kesepakatan), dan

implementation (pelaksanaan program). Setiap tahapan dianalisis untuk melihat dinamika peran antaraktor, mekanisme kerja sama, serta tantangan dan keberhasilan yang muncul dalam konteks lokal pelaksanaan ProKlim di RW 003 Cempaka Putih Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 003 Cempaka Putih Timur merupakan salah satu praktik nyata penerapan collaborative governance di tingkat komunitas. Proses kolaboratif yang terjadi melibatkan tiga aktor utama: pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta), sektor swasta (PT Indofood Sukses Makmur Tbk – Divisi Bogasari), dan masyarakat lokal. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi ketiganya dalam empat tahap utama collaborative governance, yaitu assessment, initiation, deliberation, dan implementation.

Tahap Assessment

Pada tahap assessment, kondisi awal wilayah RW 003 menjadi perhatian utama. RW 003 merupakan kawasan padat penduduk di tengah kota yang memiliki berbagai tantangan lingkungan, seperti minimnya ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang belum optimal, dan tingginya suhu udara akibat efek pulau panas perkotaan.

Namun, meskipun memiliki berbagai tantangan, wilayah ini juga memiliki keunggulan. Salah satunya adalah adanya kepemimpinan lokal yang kuat dan inisiatif warga dalam kegiatan lingkungan sejak tahun 2018. Ketua RW dan pengurus lingkungan dikenal aktif dan memiliki jejaring yang luas, yang menjadi modal sosial penting untuk keberhasilan kolaborasi.

Dari sisi kelembagaan, terdapat dukungan dari pemerintah daerah melalui kebijakan

ProKlim yang didesain untuk menjangkau wilayah kecil seperti RT dan RW. Regulasi seperti Peraturan Menteri LHK No. 84 Tahun 2016 menjadi kerangka hukum yang memperkuat legitimasi program.

Hasil assessment menunjukkan bahwa seluruh aktor memiliki kesadaran yang sama terhadap ancaman perubahan iklim dan perlunya tindakan kolaboratif. Hal ini menjadi titik awal terbentuknya konsensus untuk bekerja sama, meskipun masing-masing aktor memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis.

Keterbatasan ini justru menjadi alasan utama munculnya kolaborasi. Pemerintah menyadari tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat membutuhkan pendampingan teknis dan dana, sementara sektor swasta mencari wadah CSR yang tepat sasaran. Sinergi pun mulai dibangun berdasarkan saling melengkapi.

Tahap Initiation

Proses inisiasi diawali oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengusulkan RW 003 sebagai lokasi ProKlim. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil evaluasi terhadap komitmen warga dan kapasitas kelembagaan lokal yang telah terbentuk sejak lama.

Sebagai bagian dari inisiasi, pemerintah membentuk forum koordinasi lingkungan tingkat kelurahan dan kecamatan. Forum ini bertugas menjembatani komunikasi lintas aktor, serta menyusun agenda kerja bersama yang dapat diimplementasikan di RW 003.

Pihak swasta melalui PT Indofood (Bogasari) mulai dilibatkan dalam tahapan awal dengan mengadakan kunjungan lapangan dan diskusi bersama tokoh masyarakat. Bogasari melihat potensi wilayah ini sebagai lokasi CSR

berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup dan kesehatan.

Sementara itu, masyarakat didorong untuk membentuk tim ProKlim internal yang terdiri dari kader lingkungan, ibu-ibu PKK, karang taruna, serta tokoh agama. Tim ini menjadi ujung tombak komunikasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta.

Dalam proses inisiasi ini, pentingnya peran fasilitator juga mencuat. Dinas LH menyediakan pendamping teknis yang mendampingi RW dalam menyusun rencana kegiatan lingkungan dan melakukan pemetaan potensi serta masalah.

Tahap Deliberation

Tahapan deliberation ditandai dengan proses musyawarah bersama yang intensif. Forum-forum diskusi dilakukan di tingkat RW, kelurahan, dan bahkan di kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana aksi.

Dalam musyawarah, diputuskan berbagai program kolaboratif seperti urban farming berbasis hidroponik, pembangunan kolam gizi, pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta edukasi lingkungan untuk anak-anak. Program-program ini disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Penting dicatat bahwa deliberasi bukan sekadar formalitas. Seluruh pihak benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam merumuskan indikator keberhasilan program dan membagi tanggung jawab pelaksanaan.

Dokumen kesepakatan bersama atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RW 003, Dinas Lingkungan Hidup, dan PT Indofood ditandatangani sebagai bentuk komitmen. PKS ini memuat rincian program, kontribusi masing-masing pihak, dan mekanisme evaluasi.

Deliberasi juga mencakup proses negosiasi. Misalnya, warga awalnya keberatan terhadap program pengomposan karena masalah bau dan ruang. Namun, setelah simulasi dan penyuluhan, warga mulai menerima dan bahkan menginisiasi pembuatan komposter rumah tangga.

Tahap Implementation

Tahapan implementasi dimulai dengan pelaksanaan kegiatan konkret. Program hidroponik dibangun di lahan sempit dengan dukungan dana CSR dan pelatihan dari Bogasari. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan sayuran sehat, tetapi juga menjadi sarana edukasi anak-anak dan ibu rumah tangga.

Bank sampah diaktifkan kembali dengan sistem insentif yang menarik bagi warga. Sampah anorganik yang dipilah akan ditukar dengan poin yang bisa ditukar sembako atau kebutuhan rumah tangga. Sistem ini memperkuat kesadaran daur ulang di tingkat rumah tangga.

Di bidang adaptasi, RW 003 membuat sistem penampungan air hujan dan lubang biopori untuk menanggulangi banjir. Pemasangan panel surya untuk penerangan jalan juga mulai diperkenalkan, meskipun belum merata karena keterbatasan dana.

Kegiatan lain seperti tanam pohon, lomba kebersihan, hingga edukasi anak-anak PAUD dan SD terus digulirkan. RW 003 kini dikenal sebagai wilayah yang aktif secara lingkungan dan dijadikan percontohan oleh kelurahan lain di Jakarta Pusat.

Namun, pelaksanaan tidak berjalan mulus sepenuhnya. Masih ada warga yang belum berpartisipasi aktif karena minimnya pemahaman atau waktu. Tantangan koordinasi juga muncul karena perbedaan

ritme kerja antaraktor dan keterbatasan komunikasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah mekanisme monitoring dan evaluasi bulanan yang melibatkan semua aktor. Rapat evaluasi digunakan untuk menyampaikan progres, kendala, dan saran perbaikan. Proses ini menjaga transparansi dan akuntabilitas kolaborasi.

Analisis Reflektif

Melalui empat tahapan di atas, terlihat bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama: kesamaan visi, kepercayaan antaraktor, dan komitmen jangka panjang. Di RW 003, ketiganya terbentuk secara organik dan diperkuat oleh keberadaan pemimpin lokal yang progresif.

Secara teoritis, collaborative governance yang diterapkan di RW 003 memenuhi prinsip-prinsip utama yang dikemukakan Morse & Stephens. Seluruh aktor tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi benar-benar mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Namun, kolaborasi tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan, terutama dari pemerintah. Tanpa regulasi yang adaptif dan dukungan anggaran, kolaborasi akan sulit dijaga dalam jangka panjang. Sektor swasta juga perlu memiliki orientasi jangka panjang dalam CSR, bukan hanya proyek sesaat.

Bagi masyarakat, peningkatan kapasitas dan edukasi lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah utama. Kolaborasi akan berhasil jika seluruh warga merasa memiliki program dan memahami kontribusinya terhadap kualitas hidup mereka.

Pengalaman RW 003 menunjukkan bahwa collaborative governance bisa dijalankan

secara efektif di tingkat komunitas, bahkan di wilayah perkotaan yang padat. Kolaborasi yang berbasis kepercayaan dan kepemimpinan partisipatif dapat menjadi kunci menghadapi tantangan perubahan iklim di level lokal.

KESIMPULAN

Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 003 Cempaka Putih Timur menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dapat berjalan efektif di tingkat komunitas. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat terbukti mampu menciptakan inovasi program yang relevan dengan kebutuhan lokal dalam menghadapi perubahan iklim.

Proses collaborative governance dalam pelaksanaan ProKlim di RW 003 mencerminkan penerapan keempat tahap yang dikemukakan oleh Morse & Stephens (2012), yaitu *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Setiap tahap memperlihatkan keterlibatan aktif seluruh aktor yang saling melengkapi dalam perencanaan hingga pelaksanaan program.

Pada tahap *assessment*, kesamaan visi di antara para pemangku kepentingan menjadi pondasi awal yang kokoh untuk kolaborasi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menyadari urgensi perubahan iklim dan sepakat bahwa tindakan kolektif adalah keharusan. Potensi sosial dan semangat warga menjadi kekuatan lokal yang turut memperkuat tahap ini.

Tahap *initiation* menunjukkan bagaimana forum koordinasi dan peran fasilitator memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan antaraktor. Kehadiran PT Indofood sebagai mitra CSR memperkuat kapasitas warga melalui dukungan pelatihan dan infrastruktur, sedangkan pemerintah bertindak sebagai

pengarah dan regulator yang memastikan program berjalan sesuai pedoman.

Musyawarah dalam tahap deliberation berhasil merumuskan berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang aplikatif dan dapat diterima oleh masyarakat. Kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya urusan pemerintah.

Tahap implementation memperlihatkan keberhasilan nyata seperti pengelolaan bank sampah, pertanian hidroponik, konservasi air hujan, dan penggunaan energi terbarukan. Program ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga meningkatkan kohesi sosial dan kemandirian komunitas dalam mengelola lingkungannya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi menghadapi berbagai tantangan. Masalah koordinasi, partisipasi warga yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang perlu ditangani dengan pendekatan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Keberhasilan ProKlim di RW 003 membuktikan bahwa perubahan iklim dapat direspons secara efektif melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Kolaborasi lintas sektor dapat menjembatani keterbatasan masing-masing pihak dan menghasilkan solusi yang kontekstual serta berbasis kebutuhan lokal.

Sebagai refleksi, collaborative governance dalam isu lingkungan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan dan struktur formal. Ia menuntut kepemimpinan partisipatif, komunikasi yang terbuka, serta semangat kolektif yang tumbuh dari bawah. Dalam konteks RW 003, ketiga aspek ini berhasil diwujudkan dan dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan lokal, peningkatan literasi iklim masyarakat, serta dukungan regulasi dan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan sinergi yang berkelanjutan, program seperti ProKlim dapat menjadi bagian integral dari solusi nasional menghadapi krisis iklim yang semakin kompleks.

SARAN

Pertama, kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, disarankan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan lingkungan di tingkat RW melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan, pelatihan kader lingkungan, serta penyediaan insentif bagi wilayah yang aktif mengimplementasikan Program Kampung Iklim. Selain itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi dalam pelaporan kegiatan agar masyarakat tidak terbebani secara birokratis.

Kedua, kepada sektor swasta, disarankan untuk memperluas keterlibatan dalam program lingkungan berbasis komunitas melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak bersifat jangka pendek, melainkan berbasis kemitraan jangka panjang. Perusahaan seperti PT Indofood telah menunjukkan peran strategis dalam mendukung kegiatan ProKlim, dan praktik ini sebaiknya direplikasi oleh pelaku usaha lain dalam kerangka kolaborasi pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, untuk masyarakat RW 003 Cempaka Putih Timur, partisipasi aktif perlu terus ditingkatkan, tidak hanya dalam kegiatan fisik seperti urban farming atau bank sampah, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi program. Perlu juga ditumbuhkan kesadaran bahwa perubahan iklim adalah masalah bersama yang membutuhkan

kontribusi kolektif, tidak hanya dari segelintir individu atau pengurus lingkungan.

Keempat, secara kelembagaan, direkomendasikan agar pemerintah kota membentuk sistem insentif dan pengakuan bagi RW atau kelurahan yang berhasil menerapkan ProKlim dengan pendekatan collaborative governance. Hal ini dapat mendorong persaingan sehat antarwilayah dalam inovasi lingkungan, sekaligus mempercepat pencapaian target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat kota.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian ke wilayah-wilayah urban lain di DKI Jakarta atau kota besar lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Selain itu, analisis kuantitatif terhadap dampak ProKlim terhadap kualitas lingkungan fisik dan sosial juga akan memperkaya literatur ilmiah dan memberikan dasar empiris yang lebih kuat untuk pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Islamy, L. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri LHK Nomor P.84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim)*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565–583.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wanna, J. (2008). Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes. In J. O’Flynn & J. Wanna (Eds.), *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia?* (pp. 3–12). ANU E Press.
- World Meteorological Organization. (2024). *State of the Global Climate 2023*. Geneva: WMO. <https://public.wmo.int>

